

Komitmen Organisasi dan *Prosocial Behavior* Sebagai Pemoderasi Kompetensi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Dewa Made Ananta Satria Wibawa¹

Anak Agung Ngurah Bagus Dwirandra²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

*Correspondences: dewamadeananta@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan menguji komitmen organisasi dan *prosocial behavior* sebagai pemoderasi pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Tabanan. Sumber data adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar di 133 desa yang berada di Kabupaten Tabanan. Metode penentuan sampel yang digunakan yaitu *cluster random sampling* dengan kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa sebagai responden yang berjumlah 108 orang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah Analisis Jalur (SEM-PLS). Penelitian ini memperoleh hasil kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil uji pengaruh moderasi, penelitian ini memperoleh hasil bahwa komitmen organisasi mampu memperkuat pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa diterima dan *prosocial behavior* mampu memperkuat pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa diterima.

Kata Kunci: Komitmen; *Prosocial Behavior*; Kompetensi; Akuntabilitas.

Organizational Commitment and Prosocial Behavior as Moderators of Apparatus Competence on Village Fund Management Accountability

ABSTRACT

This study aims to examine organizational commitment and prosocial behavior as a moderator of the influence of apparatus competence on the accountability of village fund management in Tabanan Regency. The data source is primary data collected through questionnaires distributed in 133 villages in Tabanan Regency. The sampling method used was cluster random sampling with the village head, village secretary, and village treasurer as respondents, totaling 108 people. The data analysis used in this research is Path Analysis (SEM-PLS). This study found that the competence of the apparatus had a positive and significant effect on the accountability of village fund management. The results of the moderating effect test, this study found that organizational commitment was able to strengthen the influence of apparatus competence on the accountability of village fund management received and prosocial behavior was able to strengthen the influence of apparatus competence on the accountability of village fund management received.

Keywords: Commitment; *Prosocial Behavior*; Competence; Accountability.

Artikel dapat diakses: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 32 No. 5
Denpasar, 28 Mei 2022
Hal. 1129-1144

DOI:
10.24843/EJA.2022.v32.i05.p02

PENGUTIPAN:

Wibawa, D. M. A. S., &
Dwirandra, A. A. N. B. (2022).
Komitmen Organisasi dan
Prosocial Behavior Sebagai
Pemoderasi Kompetensi
Aparatur Terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan
Dana Desa. *E-Jurnal
Akuntansi*, 32(5), 1129-1144

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
30 Maret 2022
Artikel Diterima:
25 Mei 2022

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pembangunan nasional berfokus pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Pembangunan yang dicanangkan pemerintah melalui desa direalisasikan dengan pemberian dana desa kepada seluruh desa di Indonesia. Semua proses pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi setiap pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, serta mengungkapkan setiap aktivitas yang dilakukan kepada pemberi amanah (*principal*) yang berhak dan memiliki kewajiban untuk mendapatkan pertanggungjawaban. Kebijakan tersebut berimplikasi pada disetujuinya anggaran dana desa sejumlah Rp. 71,19 triliun pada tahun 2020. Pada tahun 2021 alokasi dana desa mengalami peningkatan menjadi Rp. 72 triliun yang disalurkan keseluruh desa di Indonesia.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah menjadi suatu tuntutan bagi pemerintahan desa. Undang-Undang Desa ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah desa dan mendukung percepatan pembangunan desa. Dana desa yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) akan langsung ditransfer dari rekening kas umum negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD) yang dipegang pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Pengelolaan keuangan desa tersebut agar sesuai target dan sasaran pemerintah diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk membantu merencanakan, membuat anggaran program dan kegiatan, serta mengelola keuangan desa meliputi pelaporan dan pelaksanaannya bersama perangkat desa (Wijayanti & Hanafi, 2018).

Pengelolaan dana desa membutuhkan partisipasi masyarakat, sebab prioritas penggunaan dana desa salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat. Dalam usaha memberdayakan masyarakat di berbagai kegiatan atau aktivitas desa, maka partisipasi merupakan hal wajib yang harus dilakukan (Dewi & Gayatri., 2019). Teori Agensi (*Agency theory*) akan relevan digunakan untuk menjelaskan hubungan prinsipal dan agen dalam pengelolaan dana desa. Eisenhardt (1989) menyatakan *agency theory* dapat digunakan dalam memahami hubungan *principal* dan *agent* ketika program yang dilakukan atau aktivitas yang dilakukan *agent* sulit untuk diukur keberhasilannya (Mardiasmo, 2006) menyatakan salah satu ukuran dari adanya akuntabilitas adalah laporan keuangan. Bentuk akuntabilitas pengelolaan dana desa kepada para *stakeholder*-nya di antaranya dalam bentuk formal laporan keuangan. Setiap departemen dan lembaga pemerintah harus membuat laporan keuangan dan laporan kinerja. Laporan pertanggungjawaban pemerintah yang efisien, efektif, dan ekonomis (*value for money*) merupakan bentuk dari akuntabilitas suatu daerah.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa pada Pasal 39 ayat (1) menyebutkan Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Dana Desa. Pasal 39 ayat (6) menyatakan besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebesar Rp. 300.000,00 selama 12 Bulan. Ayat (2) Pasal 39 menyebutkan bahwa penerima BLT-DD minimal memenuhi kriteria keluarga miskin atau tidak mampu yang

berdomisili di Desa bersangkutan; tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan program bantuan sosial pemerintah lainnya. Desa yang tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT dana desa, maka kepala desa menetapkan peraturan kepala desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT. Rincian dari Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk Provinsi Bali tahun 2020 dapat terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Rincian BLT-DD Provinsi Bali tahun 2020

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa	Pagu Anggaran Dana Desa 2020	Rencana Anggaran BLT-DD	Total DD untuk BLT	Persentase Realisasi Penyaluran BLT-DD (%)
1	Badung	46	55.719.888	16.754.231	16.633.500	99,28
2	Bangli	68	62.757.351	19.718.208	19.445.400	98,62
3	Buleleng	129	125.791.126	59.249.262	58.806.300	99,25
4	Gianyar	64	61.633.017	26.973.938	26.889.600	99,69
5	Jembrana	41	51.618.011	14.126.723	13.871.100	98,19
6	Karangasem	75	81.803.656	36.750.492	36.049.300	98,09
7	Klungkung	53	53.494.770	11.628.665	11.438.100	98,36
8	Tabanan	133	121.485.539	21.569.323	21.469.200	99,54
9	Denpasar	27	36.621.601	15.694.263	15.300.300	97,49

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali, 2021

Pada Tabel 1, terlihat bahwa pada tahun 2020 Kabupaten Tabanan mendapatkan pagu anggaran dana desa terbesar kedua di Bali dengan persentase realisasi penyaluran BLT-DD sebesar 99,54%. Persentase realisasi penyaluran BLT-DD ini lebih besar dari Kabupaten Buleleng sebagai penerima pagu anggaran dana desa terbesar di Bali yaitu sebesar 99,25%. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tabanan. Kabupaten Tabanan merupakan kabupaten dengan jumlah desa terbesar di Bali. Pada tahun 2021 mendapatkan kenaikan alokasi dana desa yang signifikan dari tahun sebelumnya. Kabupaten Tabanan mendapatkan dana desa sebesar Rp. 124.114.971.000 untuk 133 desa. Jumlah dana desa ini lebih besar dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 121.485.539.000 (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali, 2021).

Alokasi dana desa dengan jumlah yang signifikan tersebut membutuhkan mekanisme kontrol dan pengawasan yang optimal agar terwujud penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel. Menurut Indonesia *Corruption Watch*, korupsi menyangkut anggaran desa merupakan masalah yang disebabkan karena pengelolaan anggaran yang besar namun implementasinya di level desa tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Terdapat fenomena mengenai pengelolaan dana desa yaitu (1) laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi serta pelaporan yang tidak tepat waktu; (2) pada aspek pengawasan terdapat potensi persoalan yang dihadapi, yakni tidak terkelolanya dengan baik saluran pengaduan masyarakat oleh semua daerah dan belum jelasnya ruang lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan (3) dari aspek sumber daya manusia terdapat potensi persoalan yakni adanya

permasalahan yang dalam penatausahaan dimana sumber daya manusia dalam memahami ketentuan yang terus bergerak dan berubah yang menyebabkan masih terdapat administrasi pendukung kegiatan yang perlu diperbaiki (inspektorat.tabanankab.go.id).

Hal penting yang menjadi perhatian adalah tenaga pendamping dan aparat desa berpotensi melakukan korupsi. Seperti pada contoh kasus bendahara Desa Angkah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan yang tidak dapat mempertanggungjawabkan keuangan desa sebanyak Rp. 250.000.000 dengan melakukan rekayasa data. Dana tersebut diambil dari kegiatan di desa dan proyek di desa yang sumbernya berasal dari dana desa dan APBDes (balipost.com). Dari pemaparan tersebut tampak jelas bahwa salah satu tantangan utama di desa adalah potensi dan kompetensi aparatur setempat yang masih minim. Selain itu, permasalahan juga muncul pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, serta sulitnya mencari figur pemimpin desa yang berwawasan luas dengan kapasitas yang mumpuni.

Terdapat keterkaitan antara faktor sumber daya manusia dengan penguatan program akuntabilitas dana desa. Dalam mengelola dana desa diperlukan aparatur yang memiliki kemampuan serta bertanggung jawab mengelola dana tersebut. Kepatuhan seseorang akan aturan dan norma yang berlaku mencerminkan kompetensi seseorang. Teori Kepatuhan menggambarkan kecenderungan seseorang untuk patuh pada norma dan peraturan yang ada. Keahlian atau kompetensi agen akan menentukan output. Teori Kepatuhan diterapkan pada pemerintahan desa dalam menjalankan Undang-Undang desa mulai dari perencanaan hingga pada tahap pengelolaan, harus sesuai pada aturan yang telah ditetapkan, sehingga pemerintah desa dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Rabb & Muchlis, 2016). Faktor yang menjadi penghambat pengelolaan keuangan desa adalah terbatasnya kemampuan aparatur dan lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa. Penelitian-penelitian tentang pengaruh kompetensi aparatur pada akuntabilitas keuangan dan kinerja telah banyak dilakukan antara lain Pramayoga (2019) dan Aprilya (2020) menjelaskan bahwa kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dari dana desa. Penelitian Mahayani (2017) dan Ardianti (2020) menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aziiz (2019) dan Atmadja (2017) menjelaskan bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Hasil yang berbeda didapatkan dari penelitian Luthfiani *et, al.*, (2020), Indraswari (2021) dan Sari (2021) menemukan hasil bahwa kompetensi perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan penjelasan serta pertimbangan atas perkembangan penelitian sebelumnya yang masih beragam dan terbatas, peneliti menduga terdapat faktor kontigensi yang mempengaruhi hubungan antara kompetensi aparatur pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Agar dapat merekonsiliasi hasil yang saling bertentangan diperlukan pendekatan kontigensi untuk mengidentifikasi variabel lain yang bertindak sebagai pemoderasi ataupun pemediasi dalam model riset. Telaah penelitian telah membuktikan faktor kondisional mampu memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Ada empat

klasifikasi faktor kondisional tersebut yaitu: kultur, organisasional (komitmen organisasi), interpersonal (*prosocial behavior*), dan individual (Brownell, 1982).

Permasalahan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat disebabkan oleh beberapa faktor lain yaitu lemahnya komitmen organisasi pemerintah desa dalam mencapai tujuannya. Aparatur organisasi pemerintah desa harus memiliki komitmen organisasi sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat desa demi mencapai tujuan organisasi dan menciptakan akuntabilitas ke arah yang lebih baik (Indrayani *et al.*, 2017). Teori *Stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori *stewardship* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya (Donaldson & Davis, 1991). Konsep dari teori *stewardship* bertumpu pada kepercayaan terhadap aparatur desa, dimana aparatur dipandang mampu melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggungjawab jika memiliki kompetensi dan komitmen untuk dapat bekerja sama dengan baik sehingga dapat menerapkan sasaran anggaran secara jelas dan spesifik pada suatu desa (Mariska *et al.*, 2018). Komitmen organisasi yang dimiliki oleh aparat pemerintah desa akan memperkuat hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

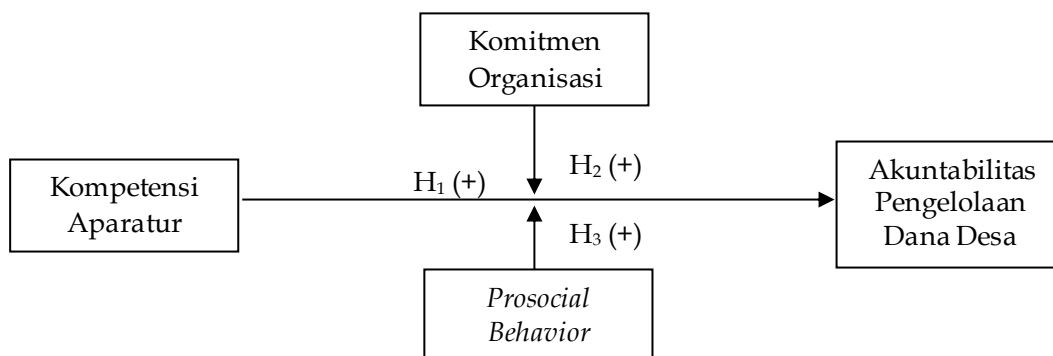
Manusia mempunyai kewajiban untuk mempertahankan keseimbangan alam semesta antara lain dalam bentuk perilaku prososial (Sarwono, 2002). Perilaku prososial terjadi pada tingkat kedekatan antara individu. Posisi formal seseorang dalam suatu organisasi atau komunitas mempengaruhi kemurahan hati seseorang terhadap anggota dalam sebuah kelompok (Baldassarri, 2013). *Prosocial behavior* adalah perilaku menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan sebagai rasa tanggung jawabnya dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Aparat pemerintah desa pada umumnya berasal dari desanya sendiri. Seseorang dalam berbagai budaya lebih senang menolong orang lain yang termasuk dalam kelompoknya (*in-group*) dibandingkan dengan seseorang yang bukan dari kelompoknya (*outgroup*) (Brewer & Brown, 1998). Peneliti menduga bahwa faktor perilaku aparat pemerintah desa menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan memegang peranan penting terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan desa. *Prosocial behavior* yang dimiliki oleh aparat pemerintah desa akan memperkuat hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Tabanan. Pada tahun 2021 kabupaten Tabanan mendapatkan kenaikan alokasi dana desa yang signifikan dari tahun sebelumnya. Selain itu Kabupaten Tabanan juga merupakan penerima alokasi dana desa terbesar kedua di Bali dimana anggaran dana desa diprioritaskan untuk program padat karya dan penyaluran BLT. Kabupaten Tabanan mendapatkan dana desa sebesar Rp. 124.114.971.000 untuk 133 desa. Jumlah dana desa ini lebih besar dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 121.485.539.000 (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali, 2021). Alokasi dana desa dengan jumlah yang signifikan tersebut membutuhkan mekanisme kontrol dan pengawasan yang optimal agar terwujud penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel. Menurut *Indonesia*

Corruption Watch, korupsi menyangkut anggaran desa merupakan masalah yang disebabkan karena pengelolaan anggaran yang besar namun implementasinya dilevel desa tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Berlandaskan latar belakang yang sudah dipaparkan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Untuk memperoleh bukti empiris kemampuan Komitmen Organisasi dalam memoderasi pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Untuk memperoleh bukti empiris kemampuan *Prosocial Behavior* dalam memoderasi pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan kajian pustaka dan uraian-uraian yang telah dipaparkan, kerangka konseptual penelitian ini disajikan dalam Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber: Data Penelitian, 2022

Pramayoga (2019) menemukan hasil bahwa kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dari dana desa. Mahayani (2017) menemukan hasil penelitian menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aziiz (2019) menemukan hasil bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Mada *et al.*, (2017) menemukan hasil kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ratih (2020) menemukan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian landasan teori dan konsep-konsep yang relevan serta hasil-hasil riset empiris terkait dapat dikatakan bahwa jika kompetensi aparatur desa memadai dalam kaitan dengan pengelolaan dana desa maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga dengan demikian dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H₁: Kompetensi aparatur berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Implikasi dari teori *stewardship* yaitu pihak yang dipercaya dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah aparatur desa. Aparatur desa yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukannya dalam organisasi untuk mewujudkan pelayanan yang baik kepada *publik* dan dapat mencapai pengelolaan anggaran yang efektif.

Sehingga dengan tingginya komitmen organisasi, aparatur desa dapat selalu bertindak hati-hati dan memberikan dampak positif bagi desa. Komitmen organisasi merupakan suatu sikap ataupun kesiapan setiap individu yang berada di dalam sebuah organisasi/ instansi pemerintahan dan tertarik dengan budaya, tujuan, dan sasaran organisasi sesuai visi dan misi, dimana individu tersebut tetap ingin berada dalam suatu organisasi tersebut (Rulyanti, 2017). Penelitian Ardianti (2020) menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Atmadja (2017) menjelaskan bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Berdasarkan uraian landasan teori dan konsep-konsep yang relevan serta hasil-hasil riset empiris terkait, dapat dikatakan bahwa jika sikap komitmen organisasi yang dimiliki oleh aparatur desa tinggi maka akan memperkuat pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga dengan demikian dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂: Komitmen organisasi memperkuat pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Teori kualitas menyatakan bahwa agar sesuai dengan yang distandarkan, suatu produk atau jasa harus dikerjakan oleh orang yang memiliki *skills* tinggi (kompeten) dan *behavior* yang baik. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam suatu organisasi. Aparat desa sebagai sumber daya manusia merupakan faktor penting bagi peningkatan produktifitas atau kemajuan organisasi. Penelitian Mahayani (2017) menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aziiz (2019) menjelaskan bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Hasil yang berbeda didapatkan dari penelitian Luthfiani *et, al.,* (2020), yang menemukan hasil bahwa kompetensi perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut selain faktor komitmen organisasi, peneliti menduga ada faktor lain yang mempengaruhi kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Peneliti menduga bahwa faktor perilaku aparat pemerintah desa memegang peranan penting terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan desa. *Prosocial behavior* yang dimiliki oleh aparat pemerintahan desa akan memperkuat hubungan antara kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian landasan teori dan konsep-konsep yang relevan serta hasil-hasil riset empiris terkait, dapat dikatakan bahwa jika perilaku prososial (*prosocial behavior*) yang dimiliki oleh aparatur desa tinggi maka akan memperkuat pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sehingga dengan demikian dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H₃: *Prosocial behavior* memperkuat pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian berada di seluruh desa dinas yang berada di Kabupaten Tabanan, Bali. Pada tahun 2021 Kabupaten Tabanan mendapatkan kenaikan alokasi dana desa yang signifikan dari tahun sebelumnya. Selain itu Kabupaten Tabanan juga merupakan penerima alokasi dana desa terbesar kedua di Bali

dimana anggaran dana desa diprioritaskan untuk program padat karya dan penyaluran BLT.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa yang diukur dengan indikator yang mengacu dari penelitian Stephanus (2019) yaitu integritas, pengungkapan dan kepatuhan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kompetensi aparatur yang diukur dengan indikator yang mengacu dari penelitian Mahayani (2017) yaitu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi yang diukur dengan indikator yang mengacu dari penelitian Medianti *et al.*, (2018), yaitu indikator komitmen afektif, komitmen normatif & komitmen berkelanjutan (kontinu), serta variabel *prosocial behavior* yang diukur dengan indikator yang mengacu dari penelitian Kusumaningrum (2014) yaitu menolong orang lain, berbagi dan menyumbang (dermawan), bekerja sama, sikap empati, kejujuran

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala desa, sekretaris desa dan kaur keuangan di setiap desa dinas di Kabupaten Tabanan yang berjumlah 399 orang. Dalam penelitian ini penulis mempersempit populasi yaitu jumlah seluruh aparat desa sebanyak 399 orang dengan menghitung ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan metode *cluster random sampling*. *Cluster random sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana populasi yang anggota-anggotanya terbagi kedalam atau berada didalam golongan-golongan menurut kesamaan ciri atau kondisi tertentu yang bukan perjenjangan. Kluster atau sub populasi dalam penelitian ini adalah kecamatan. Kabupaten Tabanan terdiri dari 10 kecamatan, 133 desa. Arikunto (2010:112) menyatakan jika subjek penelitian kurang atau sama dengan 100 maka seluruh subjek dijadikan sampel. Jika subjek penelitian lebih dari 100 maka dapat diambil 10-15% atau 20-25% dari masing-masing kluster. Dalam penelitian ini sampel yang diambil adalah 25% pada masing-masing kluster (kecamatan).

Tabel 2. Penentuan Sampel Penelitian

Kecamatan	Jumlah Desa	Persentase	Sampel	Aparat	Total
Baturiti	12	25%	3	3	9
Kediri	15	25%	4	3	12
Kerambitan	15	25%	4	3	12
Marga	16	25%	4	3	12
Penebel	18	25%	5	3	15
Pupuan	14	25%	4	3	12
Selemadeg	10	25%	3	3	9
Selemadeg Barat	11	25%	3	3	9
Selemadeg Timur	10	25%	3	3	9
Tabanan	12	25%	3	3	9
Jumlah	133		36		108

Sumber: Data Penelitian, 2021

Jumlah sampel penelitian sesuai dengan Tabel 2 adalah sebanyak 108 sampel. Untuk menentukan desa-desa yang dijadikan sampel, digunakan kriteria yaitu berdasarkan jumlah dana desa yang diterima oleh masing-masing desa.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan kuesioner. Bentuk Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan *google form* agar lebih efektif dan efisien dalam melakukan penelitian. Kuesioner dalam penelitian ini disusun menggunakan skala *likert* 1 sampai 6, yaitu jawaban responden akan diberi nilai

dengan skala 6 untuk skor tertinggi dan skala 1 untuk skor terendah. Data selanjutnya dianalisis dengan permodelan persamaan struktural berbasis varian atau komponen yaitu *Partial Least Square (PLS)*. Model dianalisis dengan software SmartPLS pada tingkat signifikansi 5 persen. PLS secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model structural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi. Setelah diperoleh hasil penelitian, maka hasil tersebut diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik responden merupakan data responden yang dikumpulkan untuk mengetahui profil responden penelitian. Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 108 orang aparat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa dari 133 desa di Kabupaten Tabanan. Adapun kriteria responden berlandaskan jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan lama bekerja dapat dijabarkan seperti yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 2. Karakteristik Responden

No.	Variabel	Klasifikasi	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Jenis kelamin	Pria	71	65.7
		Wanita	37	34.3
	Jumlah		108	100.0
2	Pendidikan Terakhir	SMA	17	15.7
		Diploma III	8	7.4
		Diploma IV	14	13.0
		Pascasarjana	10	9.3
		Sarjana	59	54.6
Jumlah		108	100.0	
3	Lama Bekerja	1-5 tahun	43	39.8
		6-10 tahun	16	14.8
		11-15 tahun	24	22.2
		16-20 tahun	18	16.7
		>20 tahun	7	6.5
Jumlah		108	100.0	

Sumber: Data Penelitian, 2021

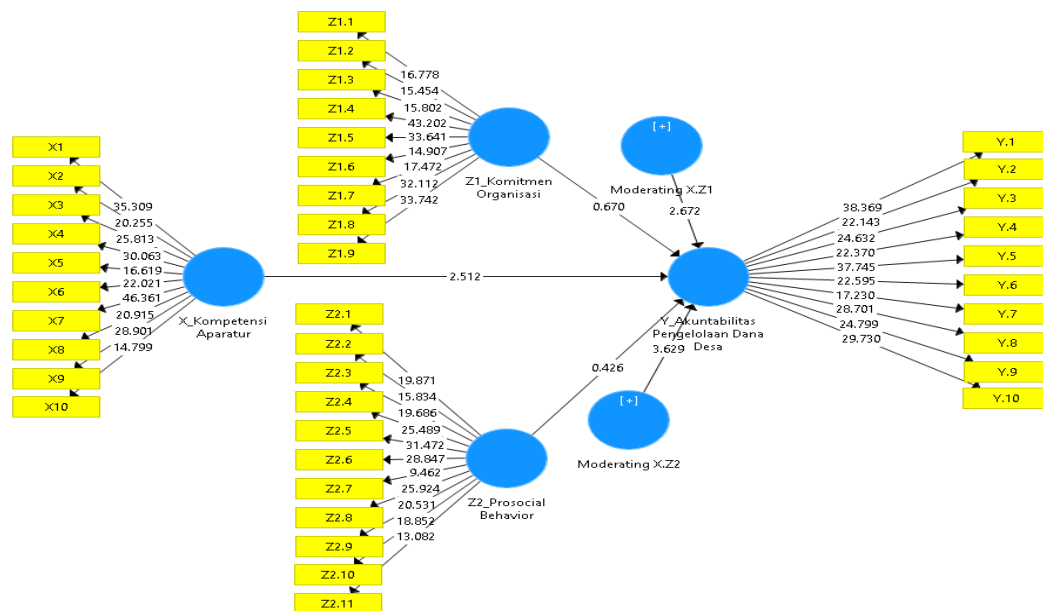
Karakteristik responden yang disajikan pada Tabel 3, menunjukkan distribusi responden berdasarkan jenis kelamin memiliki persentase tertinggi sebesar 65,7% yaitu terdapat pada responden pria. Hasil ini memberikan informasi bahwa aparat desa yang terdiri kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa dari 133 desa di Kabupaten Tabanan yang menjadi sampel pada penelitian ini dominan adalah pria dibandingkan wanita.

Pengelompokkan responden berdasarkan pendidikan terakhir menunjukkan persentase tertinggi adalah sebesar 54,6% yaitu pada jenjang pendidikan akhir Sarjana yakni 59 orang. Hal ini berarti sebagian besar aparat desa di Kabupaten Tabanan yang terdiri kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa sudah memiliki jenjang pendidikan akhir Sarjana, sehingga mampu melakukan pengelolaan dana desa dengan optimal.

Distribusi responden berdasarkan lama bekerja menunjukkan responden yang bekerja selama 1 hingga 5 tahun yakni sebanyak 43 orang (39,8%), kemudian responden yang bekerja selama 6 hingga 10 tahun yakni sebanyak 16 orang (14,8%), responden yang bekerja selama 11 hingga 15 tahun yakni sebanyak 24 orang (22,2%), responden yang bekerja selama 16 hingga 20 tahun yakni sebanyak 18 orang (16,7%), dan responden yang bekerja lebih dari 20 tahun yakni sebanyak 7 orang (6,5%). Hasil ini memberikan informasi bahwa aparat desa yang terdiri kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa di Kabupaten Tabanan yang menjadi sampel pada penelitian ini mayoritas sudah bekerja 1 hingga 5 tahun

Persentase tertinggi pada distribusi usia adalah sebesar 46,3% yaitu pada rentang usia lebih dari 21-30 tahun, sedangkan persentase terendah adalah 5,6% yaitu pada usia lebih dari 50 tahun. Hal ini berarti bahwa mayoritas aparat desa yang terdiri kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa di Kabupaten Tabanan yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah responden yang rentang usianya 21-30 tahun.

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan *path analisis* (analisis jalur) dengan menggunakan *SEM Smart PLS*. Hasil analisis *PLS bootstrapping* dapat dilihat dalam Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Model Empiris PLS Bootstrapping

Sumber: Data Penelitian, 2021

Pengujian pengaruh langsung antar variabel juga dapat dilihat dari hasil uji validasi koefisien path pada setiap jalur untuk pengaruh langsung dalam Tabel 3.

Pengujian hipotesis pada pengaruh Kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menghasilkan nilai koefisien korelasi (*Original Sample*) sebesar 0,418. Nilai *t Statistics* didapat sebesar 2,512 ($> t$ -kritis 1,96), maka pengaruh Kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah signifikan. Dengan demikian, maka hipotesis 1 (H_1) yang menyatakan bahwa Kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa diterima. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh aparat desa di Kabupaten

Tabanan maka akan berdampak pada meningkatnya akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Tabanan. Hasil ini mengindikasikan bahwa aparatur desa di Kabupaten Tabanan memahami tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas sebagai aparatur desa. Kemudian memahami proses perencanaan dan penganggaran keuangan desa dengan baik, memahami peraturan yang berkaitan dengan pekerjaan, lalu mampu bekerjasama dengan baik bersama dengan rekan kerja, mampu memecahkan masalah yang terjadi dalam pekerjaan, memahami dan mampu menyusun laporan keuangan desa dengan baik, selalu mengikuti pelatihan terkait dengan penatausahaan laporan keuangan desa, dapat mematuhi norma-norma sosial dan aturan-aturan yang berlaku di dalam melaksanakan pekerjaan, selalu menolak segala bentuk suap yang berhubungan dengan tugas dan tanggungjawab dan dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Tabel 3. Path Coefficients

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Moderating X.Z1 -> Y_Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,240	0,213	0,090	2,672	0,008
Moderating X.Z2 -> Y_Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,309	0,275	0,085	3,629	0,000
X_Kompetensi Aparatur -> Y_Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,418	0,468	0,166	2,512	0,012
Z1_Komitmen Organisasi -> Y_Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,053	0,069	0,079	0,670	0,503
Z2_Prosocial Behavior -> Y_Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,046	0,035	0,109	0,426	0,670

Sumber: Data Penelitian, 2022

Hasil penelitian ini sesuai dengan Teori Agensi, dimana Teori Agensi pada sektor publik menjelaskan masyarakat sebagai prinsipal dalam hubungan keagenan mempunyai hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari pengelolaan dana publik yang dilakukan oleh agen. Dalam Teori Kepatuhan menyebutkan dua perspektif kepatuhan yaitu perspektif instrumental dan perspektif normatif. Perspektif normatif menimbulkan persepsi bahwa seseorang cenderung untuk mematuhi hukum yang sesuai dengan norma-norma internal mereka dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Penelitian ini mendukung hasil penelitian Ratih (2020) yang menemukan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian Mahayani (2017), Mada *et al.*, (2017), Aziiz (2019) dan Pramayoga (2019) yang menemukan hasil bahwa kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dari dana desa. Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil yang didapatkan dari penelitian Luthfiani *et al.*, (2020), Indraswari (2021) dan Sari (2021) menemukan hasil bahwa

kompetensi perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengujian hipotesis pada pengaruh Komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menghasilkan nilai koefisien korelasi (*Original Sample*) sebesar 0,053. Nilai *t Statistics* didapat 0,670 ($< t$ -kritis 1,96), maka pengaruh Komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah positif tidak signifikan. Sedangkan pada pengaruh variabel interaksi Kompetensi aparatur dengan komitmen organisasi (X.Z1) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menghasilkan nilai koefisien korelasi (*Original Sample*) sebesar 0,240, dengan Nilai *t Statistics* didapat sebesar 2,672 ($> t$ -kritis 1,96), maka pengaruh variabel interaksi Kompetensi aparatur dengan komitmen organisasi (X.Z1) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah positif signifikan. Oleh karena pengaruh variabel bebas dan variabel interaksi terhadap variabel terikatnya (akuntabilitas pengelolaan dana desa) memiliki nilai koefisien yang searah, maka hipotesis 2 (H_2) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi memperkuat pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa diterima. Hal ini berarti bahwa dengan semakin tingginya kompetensi yang dimiliki aparatur desa kemudian diperkuat dengan komitmen organisasi aparatur desa yang tinggi maka akan semakin menghasilkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang semakin tinggi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *stewardship* yang menyatakan bahwa pihak yang dipercaya dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah aparatur desa. Aparatur desa yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan bertanggung jawabkan segala kegiatan yang dilakukannya dalam organisasi untuk mewujudkan pelayanan yang baik kepada *publik* dan dapat mencapai pengelolaan anggaran yang efektif. Sehingga dengan tingginya komitmen organisasi, aparatur desa dapat selalu bertindak hati-hati dan memberikan dampak positif bagi desa. Komitmen organisasi merupakan suatu sikap ataupun kesiapan setiap individu yang berada di dalam sebuah organisasi/instansi pemerintahan dan tertarik dengan budaya, tujuan, dan sasaran organisasi sesuai visi dan misi, dimana individu tersebut tetap ingin berada dalam suatu organisasi tersebut (Rulyanti, 2017). Penelitian ini mendukung hasil penelitian Ardianti (2020) menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Atmadja (2017) menjelaskan bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa, sehingga komitmen organisasi yang dimiliki aparat pemerintah desa memegang peranan penting terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Komitmen organisasi yang dimiliki oleh aparat pemerintahan desa akan memperkuat hubungan antara kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian oleh Sari (2021) yang menemukan hasil bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa dan komitmen organisasi pemerintah desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Pengujian hipotesis pada pengaruh *Prosocial behavior* terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menghasilkan nilai koefisien korelasi (*Original Sample*) sebesar 0,046. Nilai *t Statistics* didapat 0,426 ($< t$ -kritis 1,96), maka pengaruh

Prosocial behavior terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah positif tidak signifikan. Sedangkan pada pengaruh variabel interaksi Kompetensi aparatur dengan *prosocial behavior* (X.Z2) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menghasilkan nilai koefisien korelasi (*Original Sample*) sebesar 0,309, dengan Nilai *t Statistics* didapat sebesar 3,629 ($> t$ -kritis 1,96), maka pengaruh variabel interaksi Kompetensi aparatur dengan *prosocial behavior* (X.Z2) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah positif signifikan. Oleh karena pengaruh variabel bebas dan variabel interaksi terhadap variabel terikatnya (akuntabilitas pengelolaan dana desa) memiliki nilai koefisien yang searah, maka hipotesis 3 (H_3) yang menyatakan bahwa *prosocial behavior* memperkuat pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa diterima. Hal ini berarti bahwa dengan semakin tingginya kompetensi yang dimiliki aparatur desa kemudian diperkuat dengan perilaku *prosocial* aparatur desa yang tinggi maka akan semakin menghasilkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang semakin tinggi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Teori Kualitas yang menyatakan bahwa agar sesuai dengan yang distandarkan, suatu produk atau jasa harus dikerjakan oleh orang yang memiliki *skills* tinggi (kompeten) dan *behavior* yang baik. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam suatu organisasi. Aparat desa sebagai sumber daya manusia merupakan faktor penting bagi peningkatan produktifitas atau kemajuan organisasi. Penelitian ini mendukung hasil penelitian Mahayani (2017) menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aziiz (2019) menjelaskan bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa, sehingga faktor perilaku aparat pemerintah desa memegang peranan penting terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan desa. *Prosocial behavior* yang dimiliki oleh aparat pemerintahan desa akan memperkuat hubungan antara kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan dapat memberikan dukungan empiris terhadap Teori agensi, dimana Teori Agensi pada sektor publik menjelaskan masyarakat sebagai prinsipal dalam hubungan keagenan mempunyai hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari pengelolaan dana publik yang dilakukan oleh agen. Dalam teori kepatuhan menyebutkan dua perspektif kepatuhan yaitu perspektif instrumental dan perspektif normatif. Perspektif normatif menimbulkan persepsi bahwa seseorang cenderung untuk mematuhi hukum yang sesuai dengan norma-norma internal. Teori ini sesuai dengan topik penelitian ini dimana untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa maka aparatur desa diwajibkan memiliki kompetensi yang tinggi, perilaku *prosocial* yang baik dan komitmen organisasi yang tinggi.

Hasil ini juga sesuai dengan Teori *stewardship* dan Teori kualitas. Teori *stewardship* yang menyatakan bahwa pihak yang dipercaya dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah aparatur desa. Aparatur desa yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan bertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukannya dalam organisasi untuk mewujudkan pelayanan yang baik kepada *publik* dan dapat mencapai pengelolaan anggaran yang efektif. Sehingga dengan tingginya komitmen organisasi, aparatur desa dapat selalu bertindak hati-hati dan memberikan dampak positif bagi desa. Selanjutnya Teori

kualitas menyatakan bahwa agar sesuai dengan yang distandarkan, suatu produk atau jasa harus dikerjakan oleh orang yang memiliki *skills* tinggi (kompeten) dan *behavior* yang baik. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam suatu organisasi. Aparat desa sebagai sumber daya manusia merupakan faktor penting bagi peningkatan produktifitas atau kemajuan organisasi, sehingga penting untuk memiliki sikap *prosocial* yang baik.

Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini ditemukan bahwa komitmen organisasi dan *prosocial behavior* secara statistik mampu memoderasi pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga variabel tersebut dapat dipertahankan sebagai variabel pemoderasi.

Penelitian ini memberikan implikasi bagi aparatur desa di Kabupaten Tabanan sebagai pertimbangan dan pengetahuan mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Aparatur desa di Kabupaten Tabanan dapat mengevaluasi kompetensi aparatur, komitmen organisasi dan *Prosocial behavior*, karena hal tersebut dapat mempengaruhi meningkatnya akuntabilitas pengelolaan dana desa.

SIMPULAN

Simpulan dalam penelitian ini yaitu 1) Kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.; 2) Komitmen organisasi mampu memoderasi memperkuat pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa diterima; 3) *Prosocial behavior* mampu memoderasi memperkuat pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa diterima.

Berdasarkan rata-rata jawaban responden yang terendah pada variabel kompetensi aparatur yaitu pada pernyataan "Saya mampu memecahkan masalah yang terjadi dalam pekerjaan" sehingga untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam memecahkan masalah yang terjadi, maka pemerintah Kabupaten Tabanan sebaiknya rutin memberikan pelatihan kerja dengan cara memberi studi kasus masalah, untuk melatih kemampuan aparatur dalam memecahkan masalah yang terjadi dalam pekerjaan, sehingga kompetensi aparatur dapat semakin meningkat. Berdasarkan rata-rata jawaban responden yang terendah pada variabel komitmen organisasi yaitu pada pernyataan "Aparat desa merasa bangga menjadi bagian dari instansi ini" maka disarankan bagi aparatur desa di Kabupaten Tabanan untuk meningkatkan rasa komitmennya terutama dengan cara menumbuhkan perasaan bangga menjadi bagian dari instansi tempat kerjanya. Berdasarkan rata-rata jawaban responden yang terendah pada variabel *prosocial behavior* yaitu pada pernyataan "Seandainya ada pekerjaan yang sulit, saya tidak segan bertanya dengan teman" maka disarankan bagi aparatur desa di Kabupaten Tabanan untuk meningkatkan perilaku *prosocial*nya dengan cara lebih percaya diri dan tidak segan bertanya dengan rekan kerjanya seandainya ada pekerjaan yang sulit agar dapat segera terslesaikan. Berdasarkan rata-rata jawaban responden yang terendah pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu pada pernyataan "Dalam penyusunan RPJM melibatkan seluruh komponen masyarakat" maka disarankan bagi aparatur desa di Kabupaten Tabanan untuk selalu aktif mengundang dan melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam penyusunan RPJM (rencana pembangunan jangka menengah) agar aspirasi-

aspirasi yang dimiliki oleh seluruh komponen masyarakat dapat diserap dan diwujudkan.

Berdasarkan responden pada penelitian ini terdapat keterbatasan yaitu responden yang diteliti hanya aparatur desa yaitu kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa, disarankan untuk peneliti selanjutnya juga melibatkan badan pengawas desa dan juga tokoh masyarakat sebagai responden penelitian. Berdasarkan indikator yang digunakan pada kuesioner akuntabilitas pengelolaan dana desa, pada penelitian ini terdapat keterbatasan dimana indikator pada kuesioner akuntabilitas pengelolaan dana desa yang telah disebarakan belum menggunakan indikator yang ditentukan oleh Kementerian Desa.

REFERENSI

- Atmadja A T, & Saputra. (2018). Determinant Factors Influencing The Accountability Of Village Financial Management. *Academy Of Strategic Management Journal*. 17(1).
- Aziiz, N.M, & S.D Prastiti. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*. (6)2, 280-344
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1269-1298 .
- Handayani., & S. Ade. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal IAIN Surakarta*. 2 (1), 121-142
- Indrayani, L. F., Diatmika, P. G., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Publik (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 1 (2), 112-131.
- Julianto, I Putu., & G.A.K.R.S Dewi. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa Serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, (4)1, 24-42
- Lestari., N.L.P.D., Dwirandra, A.A.N.B., & Wirakusuma, M.G. (2018). Kemampuan Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kompetensi Sdm Pada Penyerapan Anggaran Pemerintah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. 6(4), 1609-1638.
- Luthfiani B.M., & T. Asmony. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*. 30(7), 1886-1899.
- Mahayani, N.L.A. (2017). Prosocial Behavior Dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*. 12(2), 130-135
- Mantako S.A.A., D. Said, & Nurleni. (2019). The Influence Of Organizational Commitment, Competence Of Village Fund Management Officers, And Utilization Of Information Technology On Accountability Of Village Financial Management. *Afebi Accounting Review (Aar)*. 4(2), 1-15

-
- Nurdin, Y., & Wijaya, I. (2019). Pengaruh Kompetensi Akuntansi Aparat Pengelola Dana Desa dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Journal Universitas Fajar*. 1 (1), 87-102
- Pramayoga, R. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Kepemimpinan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*. 30(1), 226-237.
- Utari, N. W. D. P., & Sujana, I. K. (2019). Implementasi Budaya THK dalam Pengaruh Komitmen OPD dan Partisipasi Masyarakat pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 28 (3), 1715-1731
- Wu Shuai, T.C. (2020). Corruption And Accountability In China's Rural Poverty Governance: Main Features From Village And Township Cadres. *International Journal Of Public Administration*.1(1), 1-10